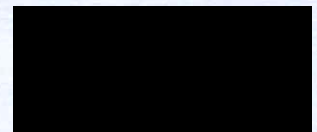




PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL KOMUNIKASI PUBLIK DAN MEDIA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL REPUBLIK INDONESIA
DAN
SEKRETARIAT UTAMA
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: [REDACTED]
NOMOR: HK.02.00/01/2026
TENTANG
DISEMINASI INFORMASI PUBLIK
MELALUI PEMBERDAYAAN DUTA DAMAI

Pada hari ini, Senin tanggal Sembilan Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (19-01-2026), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. [REDACTED], diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 1/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital tanggal 02 Januari 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut PIHAK KESATU; dan
2. [REDACTED] diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor: 153/TPA Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tanggal 01 Desember 2022, dalam hal ini bertindak



untuk dan atas nama Sekretariat Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang berkedudukan di Kompleks Indonesia Peace and Security Center, Jalan Anyar, Desa Sukahati, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor 16810, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

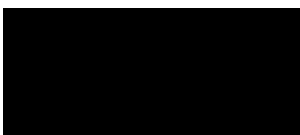
- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Unit Eselon I di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital, yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi publik dan media;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah unit Eselon I di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, yang mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerja sama; dan
- c. bahwa telah ditandatangani Nota Kesepahaman antara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dengan Kementerian Komunikasi dan Digital, Nomor HK.02.00/06/2025 dan Nomor 05/M.KOMDIGI/HK.04.02/05/2025 tentang Penanggulangan Terorisme melalui Dukungan Penyelenggaraan Program Bidang Komunikasi dan Informasi pada tanggal 26 Mei Tahun 2025.

Oleh karena itu, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan kerja sama PARA PIHAK dalam menyelenggarakan kegiatan diseminasi informasi publik kepada masyarakat yang dilakukan oleh Penyuluh Informasi Publik.



- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah mewujudkan kerja sama yang sinergis antara PARA PIHAK guna mendukung kelancaran kegiatan diseminasi informasi publik kepada masyarakat oleh Penyuluh Informasi Publik secara efektif, efisien, transparan, proporsional, dan akuntabel.

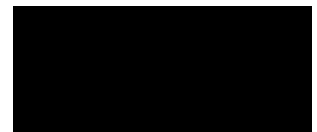
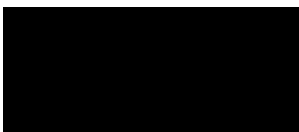
Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pemberdayaan Duta Damai sebagai Penyuluh Informasi Publik;
- b. pengembangan kapasitas teknis Duta Damai sebagai Penyuluh Informasi Publik melalui penyelenggaraan bimbingan teknis dan pelatihan;
- c. pelaksanaan diseminasi informasi publik oleh Duta Damai terkait program strategis dan prioritas pemerintah di daerah lain yang masih membutuhkan penyampaian informasi secara langsung;
- d. pemanfaatan Sistem Informasi Penyuluh Informasi Publik (SI-PIP) bagi Penyuluh Informasi Publik; dan
- e. pemantauan dan evaluasi kinerja Duta Damai sebagai Penyuluh Informasi Publik.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KESATU menunjuk Unit Kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang kemitraan komunikasi lembaga dan kehumasan sebagai pelaksana atas Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) PIHAK KEDUA menunjuk Unit Kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang kontra radikalitas sebagai pelaksana atas Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat secara sendiri-sendiri atau bersama-sama membentuk tim pelaksana sesuai kebutuhan.
- (4) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, dan pelaporan program dan kegiatan.
- (5) PARA PIHAK senantiasa melakukan koordinasi dalam mengimplementasikan kerja sama yang telah disepakati sebagai tugas dan tanggung jawabnya.



Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak dan kewajiban PIHAK KESATU meliputi:**
 - a. menentukan lokasi penempatan Penyuluh Informasi Publik;
 - b. menetapkan kualifikasi Penyuluh Informasi Publik;
 - c. menyediakan pedoman kerja, modul, konten, dan bahan diseminasi informasi publik yang akan dilaksanakan oleh Penyuluh Informasi Publik;
 - d. menyediakan SI-PIP yang akan digunakan untuk operasional kerja Penyuluh Informasi Publik;
 - e. mengangkat, memberi teguran, dan/atau memberhentikan Penyuluh Informasi Publik, sesuai hasil pemantauan dan evaluasi kinerja; dan
 - f. memberikan rekomendasi penggantian Duta Damai sebagai personil Penyuluh Informasi Publik berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA meliputi:**
 - a. menyediakan Duta Damai yang akan diberdayakan sebagai Penyuluh Informasi Publik pada lokasi yang telah ditentukan PIHAK KESATU;
 - b. menyediakan Duta Damai yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan ketentuan PIHAK KESATU; dan
 - c. menyediakan pengganti Duta Damai yang tidak memenuhi target kinerja sebagai Penyuluh Informasi Publik berdasarkan rekomendasi PIHAK KESATU atas hasil pemantauan dan evaluasi kinerja.
- (3) PARA PIHAK bertugas dan bertanggung jawab:**
 - a. menyelenggarakan bimbingan teknis dan pelatihan bagi Penyuluh Informasi Publik;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja Penyuluh Informasi Publik; dan
 - c. memberikan motivasi kerja kepada Penyuluh Informasi Publik.

Pasal 5

BIAYA

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini akan ditanggung dan dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan atas dasar evaluasi.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, PIHAK yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lama 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 7

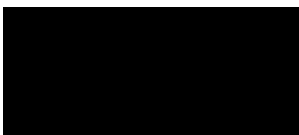
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK secara bersama-sama melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 8

KEADAAN KAHAR

- (1) Salah satu PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut Keadaan Kahar.



- (2) Kejadian-kejadian berikut yang termasuk dalam Keadaan Kahar adalah kerusuhan massal, perang saudara, pemberontakan, perebutan kekuasaan, perang dengan negara lain atau terorisme, gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan gunung berapi dan/atau bencana alam lainnya, sengketa hubungan industrial, atau pemogokan massal yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah secara material.
- (3) Salah satu PIHAK hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dengan alasan Keadaan Kahar jika:
 - a. keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban pihak tersebut; dan
 - b. tidak ada unsur kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak tersebut.
- (4) Pihak yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan pihak lainnya secara lisan paling lama dalam waktu 1x24 jam sejak terjadinya Keadaan Kahar yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut. Pemberitahuan itu paling sedikit harus menjelaskan jenis Keadaan Kahar yang terjadi, perkiraan lamanya Keadaan Kahar akan berlangsung dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh pihak yang mengirimkan pemberitahuan.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama dibuat dan tunduk kepada ketentuan hukum negara Republik Indonesia.
- (2) Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.

Pasal 10

PERUBAHAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk adendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11

PEMBERITAHUAN

Segala pemberitahuan, peringatan, dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis kepada masing-masing pihak dengan alamat:

PIHAK KESATU

Direktur Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan

Alamat :

Telepon :

Surel :

PIHAK KEDUA

Kepala Biro Perencanaan, Hukum, dan Hubungan Masyarakat

Alamat :

Telepon :

Surel :



Pasal 12
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

